

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NGANJUK

**Dian Ninis, Setyowati**

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [dianninis@gmail.com](mailto:dianninis@gmail.com)

---

Submitted: 26-09-2024 | Accepted: 24-02-2025 | Published: 28-02-2025

---

<b>Kata Kunci:</b> <i>Implementasi;</i> <i>Perpres;</i> APBD.	<b>Abstrak</b> Tujuan penelitian ini adalah pertama Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Kedua, Mendeskripsikan dan menganalisis faktor Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk berjalan cukup baik.
<b>Keywords:</b> : <i>Implementation,</i> APBD	<b>Abstract</b> <i>The aim of this research is first to describe and analyze the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020. Second, describe and analyze what factors hinder and support the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards for Planning and Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budgets in Nganjuk Regency. This research uses qualitative research. This type of qualitative research uses descriptive analysis methods. The results of research on the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards for Planning and Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budgets in Nganjuk Regency are going quite well</i>

### PENDAHULUAN

Secara umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan transparan dalam penetapan harga-harga di tingkat regional, sehingga tidak ada lagi gap/jarak pembangunan antar pemerintah

pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Nganjuk masih ditemui kendala-kendala yaitu :

- a. Standar Harga yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020;
- b. Sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020 namun angka yang terlalu besar atau kecil;
- c. Adanya kepentingan politik yang masih membayangi dalam penyusunan standar satuan harga.

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap fenomena secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari lingkungan yang alami sebagai sumber utama menggunakan alat penelitian itu sendiri. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, penulis memilih narasumber penelitian dengan mempertimbangkan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang relevan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai BPKAD Kabupaten Nganjuk. Data utama didapat melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis terkait dengan topik penelitian. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Hubberman.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel Matriks Hasil Penelitian**

Permasalahan	Fokus	Data Hasil Wawancara	Temuan Peneliti
1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Komunikasi Kebijakan	- Indikator transmisi dan indikator kejelasan ditemukan dengan kondisi penyampaian peraturan yang baik dengan kendala. Meskipun terkadang masih dijumpai misskomunikasi	Positif : sosialisasi peraturan yang baik terhadap pemerintah daerah  Negatif : pemerintah daerah masih perlu adaptasi dengan penjelasan perpasal yang berjenjang dan menunggu waktu
	Sumberdaya	- Sumber Daya yang dimiliki mencakup sebagai berikut. a) Sumberdaya Manusia berjumlah 39 orang. b) Sumberdaya Fasilitas	Positif : seluruh sumberdaya terpenuhi dengan baik sesuai dengan kebutuhan.  Negatif : -

Permasalahan	Fokus	Data Hasil Wawancara	Temuan Peneliti
		<p>Sarana mencakup Komputer, printer, Meja, Kursi,..dsb. sedangkan Prasarana adalah Gedung dan ruangan.</p> <p>c) Sumber daya Informasi di distribusikan belum berjalan dengan optimal dengan beberapa perubahan anggaran.</p> <p>d) Wewenang dimiliki pelaksana sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk</p>	

Permasalahan	Fokus	Data Hasil Wawancara	Temuan Peneliti
	Disposisi	- Pemilihan pelaksana pegawai berubah tidak ditemukan kesalahpahaman dengan memilih pegawai berdasarkan pendidikan dan kemampuannya	Positif : pelaksana bekerja dengan efektif tanpa insentif khusus.  Negatif : -
	Struktur Birokrasi	- standar operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk	Positif : seluruh bagian berjalan sesuai dengan pedoman SOP yang ada dan setiap bagian terfragmentasi dengan baik.  Negatif : -

### Pembahasan

Guna mengkaji penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk menggunakan teori Edward. Teori Edward untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif sebagai berikut.

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya (*resource*)
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut.

- a. Perubahan Harga yang Terjadi di Tahun Pelaksanaan Anggaran

Salah satu masalah yang menyebabkan program Standar Satuan Harga Regional tidak berjalan adalah adanya kenaikan harga pasar dalam satu

satuan biaya yang di atur dalam perpres 33 tahun 2020. Maka dalam hal ini, BPKAD perlu merancang anggaran sedemikian rupa yang tidak menyalahi acuan dalam peraturan namun sesuai dengan kondisi pasar agar kegiatan dan program tetap terlaksana.

b. Salah Input Standar Satuan Harga Pada Rincian Anggaran Belanja SKPD/UKP

Salah input data satuan harga standar satuan harga pada rincian anggaran belanja SKPD/UKPD, hal ini disebabkan kurang teliti dalam memilih standar harga satuan yang sesuai dengan indikator capaian program anggaran belanjanya. Hal ini juga merupakan bentuk Pengendalian Internal Yang Tidak Dijalankan Dengan Baik oleh SKPD/UKPD. Hasil observasi peneliti Karena masih adanya SKPD/UKPD yang menyerahkan tugas penyusunan anggarannya kepada pegawai non ASN.

c. Peran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam melakukan supervisi pada rincian anggaran belanja belum optimal..

perlunya supervisi ekstra oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap kesalahan yang tidak terdeteksi merupakan bentuk kesalahan supervisi TAPD yang tidak optimal. Maka dalam hal ini perlu sinergitas petugas input data dan juga TAPD dalam input satuan harga regional yang diterapkan sesuai Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SSHR) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan standar satuan harga regional berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut.

a. Responsibilitas Para Pegawai dalam mengatasi kesalahan input

Seluruh pegawai memiliki komitmen dalam menjalankan setiap pekerjaan

termasuk dalam menjalankan standar satuan harga regional sehingga masalah yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran tidak berlarut sampai mengorbankan pelayanan dan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini nampak pada hasil kinerja tahun 2023 yang seluruhnya mencapai target 100%

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Presiden Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Nganjuk cukup baik, hal tersebut berdasarkan pada :
  - a. Komunikasi,  
Komunikasi berjalan baik mengingat BPKAD Kabupaten Nganjuk dapat melaksanakan dan beradaptasi dengan baik dengan adanya Perpres 33 tahun 2020. Antisipasi pelaksanaan Peraturan ini dengan Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan amanat dari Perpres tersebut.
  - b. Sumber Daya,  
Sumber daya cukup baik dengan memenuhi 4 aspek sumber daya. Sumberdaya yang memenuhi adalah sumber daya manusia, fasilitas wewenang dan sumberdaya informasi.
  - c. Disposisi,

Penyerahan kewenangan sudah berjalan dengan baik diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

d. Struktur Birokrasi,

seluruh bagian berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman Standar operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk.

2 Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah :

- Responsibilitas Para Pegawai dalam mengatasi kesalahan input.

Sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah :

- Perubahan Harga yang Terjadi di Tahun Pelaksanaan Anggaran.
- Salah Input Standar Satuan Harga Pada Rincian Anggaran Belanja SKPD/UKP.
- Peran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam melakukan supervisi pada rincian anggaran belanja belum optimal.

**Saran**

1. Perlu lebih meningkatkan komunikasi terutama komunikasi dengan pihak luar berkaitan dengan adanya kajian pangsa pasar secara mendalam agar satuan harga yang berubah tidak mempengaruhi terselenggaranya program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Nganjuk.
2. Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber daya terutama sumber daya manusia dengan pelatihan untuk konsistensi dan kecermatan pegawai dalam mengerjakan setiap input satuan harga dalam sistem informasi.
3. Perlu adanya peningkatan Struktur Birokasi dimana struktur ini adalah peran TAPD agar melakukan supervisi rincian anggaran secara mendalam.

## REFERENSI

- Alwi, Syafaruddin. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi)
- D.L, Weimer, and Vening A.R. 2005. *Policy Analysis, Concepts And Practice, Fourth Edition* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River)
- Dunn, William N. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedu (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Fattah, Nanang. 2017. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Frederick, William C., Keith Davis, and James E. 1998. *Post. Business and Society, Coeporate Strategy, Publik Policy, Ethics Sixth Edition* (New York: McGraw-Hill Publishing Company)
- Islamy, M. I. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bina Aksara)
- Jones, Charles O. 2004. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, ed. by Editor Nashir Budiman (Jakarta: Rajawali Pers)
- Koontz, and Weihrich. 2015. *Manajemen*, Jilid dua (Jakarta: Erlangga)
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.)
- Mudja, Rahardjo. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press)
- Muhammad. 2018. Birokrasi, Kajian konsep teori menuju Good Governance

(Lhokseumawe:Unimal Press)

- Noeng H, Muhamad. 2013. *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Research* (Yogyakarta: Rake Sarakin)
- Nugroho, Riant. 2017. *Publik Policy* (Jakarta: Alex Media Komputindo)
- Patton, and Sawicki. 1986. *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning, Whitelhall* (Wellington New Zaeland: Book Liited)
- Purwanto, and Sulistyastuti. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia* (Jakarta: Gava Media)
- Rifal, and Sulaeman. 2016. 'Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin ( Raskin ) Di Desa Tolongan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala', *Agrotekbis*, Vol 4.5: 1–9
- Samodra, Wibawa. 2004. *Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Silalahi, Ulber. 2018. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Revika Aditama)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Interpretatif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta)
- Tangkilisan, H. N. S. 2017. *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Geasindo)
- Usman, Husaini, Akbar, and Purnomo S. 2017. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Wahab. 2010. *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Winarno, Budi. 2014. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo)
- Zuswana, Aries. 2021. 'Evaluasi Implementasi Program Outsourcing Di PT Elnusa Petrofin', *Sosio E-Kons*, 15.1: 90 <<https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.16667>>

## JURNAL

- Dio, and Syahrullah. 2014. 'Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012', *Skripsi*: 1–108 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29240>>
- Putri, Z A. 2019. 'Pengaruh Desain Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Perum Perumnas Regional I Medan': 1–72 <<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10725> - Zakia Aida Putri - Fulltext.pdf>
- nizarsyah, faizal, and Priyanto. 2023. 'Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan APBD Faishal Nizarsyah, Priyanto', *SMIA Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik Tahun 2023*: 245–52